

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi SMA Negeri 93 Jakarta

Berdirinya SMA Negeri 93 Jakarta tidak terlepas dari nama Bapak Hasan Basri sebagai Lurah Kampung Tengah dan Mayor Hamid yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Kompleks Pasukan Pengawas Presiden (sekarang Paspampres), beliau menghibahkan tanah kompleks seluas 8090 m² kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional).

Pada tahun 1985 di atas tanah tersebut dibangunlah gedung sekolah oleh Depikbud DKI Jakarta yang direncanakan menjadi SMA Negeri Baru Kramat Jati, Jakarta Timur. Di penghujung tahun 1986 yaitu tepatnya pada tanggal 22 Desember 1986 dengan SK Nomor 0887/0/1986 dan diperkuat dengan SK 08/05.1/E/1987 tanggal 21 Januari 1987. Sejak itu SMA Negeri Baru Kramat Jati berubah namanya menjadi SMA Negeri 93 Jakarta.

Pengumuman nama-nama siswa yang diterima dilaksanakan sendiri oleh Bapak D. Sianipar yang ditunjuk menjadi pimpinan pertama sekolah ini. Beliau adalah guru olahraga sekaligus menjadi Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jakarta. Guru dan pegawai baru ada bersamaan dengan diselenggarakan penataran P-4 yang terdiri dari:

seorang Ka. Tata Usaha yaitu Bapak Entjep Sopiati, dan 4 orang guru yaitu Bapak P. Silalahi. (dari SMA Negeri 48 Jakarta), beliau mengajar PMP, Ibu Hadidjah Z. (dari SMA Negeri 37 Jakarta), beliau mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Tigor Hutajulu. (dari SMA Negeri 61 Jakarta), beliau mengajar Penjas, Ibu Dwi Jawanti. (dari SMA Negeri 61 Jakarta), beliau mengajar Ekonomi dan Akuntansi. Ketika itu, siswa baru sebanyak empat kelas.

Tanggal 21 Juli 1986 tenaga pengajar lainnya datang melapor kepada Bapak D. Sianipar, yang umumnya adalah guru pindahan dari SMA lain yaitu sebanyak enam orang dari SMA Negeri 61 Jakarta, dari SMA Negeri 37 Jakarta, SMA Negeri 64 Jakarta dan SMEA masing-masing satu orang. Untuk melengkapi guru pengajar, Bapak D. Sianipar mencari pengajar dari SMA Negeri 39 Jakarta, SMA Negeri 51 Jakarta dan IKIP Jakarta.

Pada tahun 1987/1988 sekolah ini menerima murid baru kelas satu sebanyak empat kelas. Kegiatan ekstrakurikuler mulai bermunculan seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Kerohanian Kristen (SKK), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Sembilan Tiga Pencita Alam (Segapala), Kelompok Karya Ilmiah (KIR), *Tae Kwon Do*, dan Sepakbola. Pada tahun itu, berdiri gedung Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SKPG), yang dititipkan Depdikbud untuk dikelola dalam pelaksanaan penataran guru bidang studi Bahasa Inggris. Namun, pada tahun 1991/1992 gedung SKPG beralih fungsi menjadi tempat pelaksanaan penataran guru bidang studi IPA (Biologi, Fisika, dan Kimia).

Tanggal 27 Agustus 1991 SMA Negeri 93 Jakarta mengalami perubahan pimpinan dari Bapak D. Sianipar yang dialih tugaskan menjadi Kepala sekolah SMA

Negeri 27 Jakarta. Jabatan beliau diserahkan kepada Bapak MTS. Tambunan, mantan Wakil SMA Negeri 4 Gambir Jakarta, beliau memimpin sekolah ini selama kurang lebih empat tahun. Saat masa kepemimpinannya dibentuklah Reaksi Seni Sembilan Tiga (Ressega) dan berhasil meraih juara pertama Lomba Kebersihan antar Kecamatan Kramatjati.

Pada tanggal 23 Februari 1995 SMA Negeri 93 Jakarta mengalami perubahan pimpinan dari Bapak MTS. Tambunan diserahkan kepada Bapak W. Reubun. Beliau memimpin kurang lebih tiga tahun. Di bawah kepemimpinan beliau SMA Negeri 93 Jakarta berusaha untuk meningkatkan dan menggalakkan “Gerakan Disiplin Nasional (GDN)”, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali tata tertib sekolah yang wajib ditaati oleh para siswa-siswi.

Tanggal 19 Januari 1998 dilaksanakan serah terima jabatan kepala sekolah SMA Negeri 93 Jakarta dari Bapak W. Reubun kepada Ibu Sutinah Dwiastuti, beliau adalah guru teladan tingkat DKI Jakarta, beliau adalah Kepala sekolah wanita pertama di sekolah ini, dan beliau hanya menjabat selama empat tahun.

Setelah Ibu Sutinah Dwiastuti, kepemimpinan sekolah ini digantikan oleh Bapak Laily Saher dengan masa jabatan selama empat tahun, beliau saat ini menjadi Kepala SMA Negeri 36 Jakarta, kepemimpinan beliau digantikan oleh Bapak Tri Sugiareno dengan masa jabatan selama kurang lebih tiga tahun. Pada masa kepemimpinan beliau, sekolah ini direnovasi menjadi tiga tingkat. Pada tahun 2007 sampai sekarang sekolah ini dipimpin oleh Bapak Barita Pakpahan.

2. Visi dan Misi SMA Negeri 93 Jakarta

VISI

Terbentuknya Manusia yang Berkualitas dan Berdayaguna

MISI

- § Meningkatkan Intak semua warga sekolah.
- § Menyiapkan siswa melanjutkan ke Perguruan/Pendidikan Tinggi.
- § Memyiapkan siswa untuk memperoleh nilai kelulusan yang baik.
- § Meningkatkan kebersihan dan kesehatan.
- § Mendorong dan membantu siswa mengembangkan potensi dirinya.
- § Meningkatkan kegiatan Ekstrakurikuler.
- § Menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

3. Keadaan Pesertadidik, Guru, dan Ruangan

Adapun yang menjadi pesertadidik di SMA Negeri 93 Jakarta saat secara umum merupakan anak-anak yang secara geografis tinggal tidak jauh dari wilayah sekolah dan sekitar. Secara ekonomi orangtua mereka dari kalangan menengah dan dapat terjangkau untuk membiayai anak-anak bersekolah. SMA Negeri 93 Jakarta, merupakan sekolah yang dapat terjangkau biayanya oleh masyarakat sekitar.

Pesertadidik yang bersekolah di SMA Negeri 93 Jakarta memiliki karakter yang secara umum dapat disebut sama. Hal ini dikarenakan latar belakang keluarga serta lingkungan tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan pesertadidik di sekolah ini memiliki rasa toleransi yang tinggi, karena yang beragama Islam cukup banyak yaitu sekitar 536 orang, beragama Kristen Protestan 67 orang, beragama Kristen

Katolik 10 orang, beragama Hindu 3 orang, dan beragama Budha 1 orang, tetapi mereka saling hidup berdampingan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Jumlah murid yang menjadi peserta didik di sekolah ini pada tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 617 orang, dengan penyebaran siswa kelas X sebanyak 227 orang, yang terdiri dari 108 orang anak laki-laki dan 119 orang anak perempuan. Kelas X ini terdiri dari enam kelas yaitu: kelas X-1 terdiri dari 38 orang, (15 orang anak laki-laki dan 23 orang anak perempuan), kelas X-2 terdiri dari 39 orang, (19 orang anak laki-laki dan 20 orang anak perempuan), kelas X-3 terdiri dari 37 orang, (16 orang anak laki-laki dan 21 orang anak perempuan), kelas X-4 terdiri dari 37 orang, (20 orang anak laki-laki dan 17 orang anak perempuan), kelas X-5 terdiri dari 37 orang, (15 orang anak laki-laki dan 22 orang anak perempuan), dan kelas X-6 terdiri dari 39 orang, (23 orang anak laki-laki dan 16 orang anak perempuan). Sedangkan untuk kelas XI siswanya sebanyak 197 orang, yang terdiri dari 96 orang anak laki-laki dan 101 orang anak perempuan. Kelas XI ini terdiri dari lima kelas yaitu: kelas XI IPA 1 terdiri dari 40 orang, (20 orang anak laki-laki dan 20 orang anak perempuan), Kelas XI IPA 2 terdiri dari 40 orang, (18 orang anak laki-laki dan 22 orang anak perempuan), kelas XI IPS 1 terdiri dari 40 orang, (17 orang anak laki-laki dan 23 orang anak perempuan). Kelas XI IPS 2 terdiri dari 39 orang, (23 orang anak laki-laki dan 16 orang anak perempuan), dan kelas XI IPS 3 terdiri dari 38 orang, (18 orang anak laki-laki dan 20 orang anak perempuan). Kelas XII siswanya terdiri dari 193 orang, yang terdiri dari 86 orang anak laki-laki dan 107 orang anak perempuan. Kelas XII ini terdiri dari lima kelas yaitu: kelas XII IPA 1 terdiri dari 40 orang, (16 orang anak laki-laki dan 24 orang anak perempuan), kelas XII IPA 2 terdiri dari 40

orang, (16 orang anak laki-laki dan 24 orang anak perempuan), kelas XII IPS 1 terdiri dari 39 orang, (18 orang anak laki-laki dan 21 orang anak perempuan), kelas XI IPS 2 terdiri dari 37 orang, (18 orang anak laki-laki dan 19 orang anak perempuan), dan kelas XI IPS 3 terdiri dari 37 orang, (18 orang anak laki-laki dan 19 orang anak perempuan). Kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.

Adapun jumlah pengajar yang bertugas di SMA Negeri 93 Jakarta sebanyak 50 orang pengajar dan 14 orang staf tata usaha. Di lihat dari kualifikasi tenaga pengajar yang bertugas di SMA Negeri 93 Jakarta mayoritas berpendidikan S-1 dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai kampus, baik negeri maupun swasta.

Jumlah ruangan yang tersedia terdiri dari 6 ruang yang diperuntukkan untuk kelas X yang berada di lantai 3, kelas XI terdiri dari 5 ruang yaitu 2 ruang di lantai 2 dan 3 ruang berada di lantai 3, sedangkan kelas XII terdiri dari 5 ruang yang berada di lantai 2. Terdapat 5 Laboratorium yaitu di lantai 1 terdapat Laboratorium Biologi. Di lantai 2 terdapat Laboratorium Fisika dan Bahasa. Di lantai 3 terdapat Laboratorium Kimia dan Komputer. Selebihnya ruangan yang ada diperuntukkan untuk ruang Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang Komite, ruang BP/BK, Perpustakaan, 2 ruang Koperasi, ruang Tata Usaha, ruang MGMP, ruang OSIS, ruang Audio Visual, 2 ruang UKS, 2 ruang untuk gudang, dapur, kantin, dan WC Putra dan WC Putri.

4. Proses Pembelajaran Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tentang pendidikan Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran yang memuat materi Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di sekolah. Dalam pembelajaran di kelas lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah sebagai metode utama. Dengan metode seperti ini, guru dapat mensosialisasikan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diantaranya mengenai perubahan struktur dan sistem kelembagaan negara termasuk pembentukan lembaga baru, sehingga peserta didik dapat mengetahui tentang adanya perubahan tersebut. Selain metode tersebut, di dalam kelas diadakan kegiatan tanya jawab dan diskusi, tetapi kegiatan seperti itu sering terkendala oleh waktu. Di dalam kelas guru hanya menerangkan materi yang ditampilkan di papan tulis. Guru sebelum memberikan materinya kepada peserta didik di kelas, sebelumnya telah membuat rancangan pembelajaran, sehingga bahasan yang akan dijelaskan sesuai dengan indikator. Adapun untuk kejelasan lebih lanjut, peserta didik yang belum dapat memahami materi yang diuraikan, mereka dapat menanyakan hal tersebut setelah guru selesai memberikan penjelasan, sehingga terjadi pola interaksi antara peserta didik, guru, dan peserta didik lainnya di dalam kelas. Hal ini membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan tidak membuat peserta didik menjadi bosan dalam belajar, sehingga dapat merangsang daya pikir peserta didik untuk lebih kritis dalam menganalisis suatu permasalahan.

Di era informasi sekarang ini telah terjadi perubahan peranan guru. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar (*learning resources*), akan tetapi lebih berperan sebagai pengelola pembelajaran (*manager of instruction*). Dalam posisi semacam ini bisa terjadi guru dan pesertadidik saling belajar. Proses belajar mengajar seperti ini diterapkan di sekolah tersebut, karena guru menugasi kepada pesertadidik untuk membuat berbagai makalah yang berkaitan dengan materi yang sedang diberikan. Pesertadidik diberikan kebebasan untuk mencari materi melalui media internet dan surat kabar, sehingga pesertadidik mendapatkan tambahan informasi dan ilmu pengetahuan dari media pembelajaran yang lain selain dari guru di sekolah, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses belajar mengajar, terutama masih terbatasnya media pembelajaran di sekolah, seperti masih terbatasnya komputer di sekolah tersebut.

Oleh karena itu, dengan terjadinya hal tersebut di atas berarti proses belajar mengajar yang berlangsung di SMA Negeri 93 Jakarta telah menerapkan standar proses pendidikan yang ada. Akan tetapi, sampai saat ini metode ceramahlah yang tepat digunakan dalam proses belajar mengajar, terutama dalam kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Proses Pemahaman Pesertadidik kelas XI di SMA Negeri 93 Jakarta

Selanjutnya akan dipaparkan data-data hasil penelitian yang akan memperlihatkan Pemahaman Pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara keseluruhan jumlah pesertadidik kelas XI yang mengikuti test pengukuran pemahaman tentang Sistem Pemerintahan

Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada saat penelitian ini berlangsung sebanyak 180 orang, karena sebanyak 17 orang tidak hadir ke sekolah. Nilai KKM untuk pelajaran PKn kelas XI di sekolah ini yaitu 65,1 dan nilai rata-rata dari test pengukuran pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah 66.

Pemahaman pesertadidik akan Sistem Pemerintahan Indonesia diperoleh melalui kemampuan pesertadidik dalam menjawab item-item pertanyaan, untuk mengetahui tingkat penguasaan yang merupakan dari pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah mereka pelajari dalam materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk melihat tingkat pemahaman materi oleh pesertadidik yang merupakan hasil dari pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilihat dari kategori berikut:

91-100 sangat baik

81-90 baik

71-80 cukup

61-70 kurang

< 60 sangat kurang

Berdasarkan kategori di atas, untuk mengetahui proses pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1
Wewenang MPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
1.	Wewenang MPR adalah melantik dan memberhentikan: a. Presiden dan Wakil Presiden b. Anggota DPD c. Anggota MA d. Anggota BPK e. Anggota DPR	175	97	5	3

Dari tabel di atas diketahui bahwa 175 peserta didik atau 97% menjawab benar, sedangkan 5 peserta didik atau 3% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang MPR sangat baik.

Tabel 2
Wewenang BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
2.	Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan APBN kepada DPR adalah: a. DPD b. MA c. BPK d. KY e. MK	157	87	23	13

Dari tabel di atas diketahui bahwa 157 peserta didik atau 87% menjawab benar, sedangkan 23 peserta didik atau 13% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik mengetahui baik tentang wewenang BPK dalam hal melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan APBN kepada DPR.

Tabel 3
Wewenang Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
3.	Lembaga negara RI yang melaksanakan kekuasaan yudikatif adalah: a. MA b. DPR c. DPD d. Presiden e. BPK	79	44	101	56

Dari tabel di atas diketahui bahwa 79 peserta didik atau 44% menjawab benar, sedangkan 101 peserta didik atau 56% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan yudikatif sangat kurang.

Tabel 4
Tugas Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
4.	Lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD adalah: a. BPK b. Presiden c. MK d. DPR e. DPD	116	64	64	36

Dari tabel di atas diketahui bahwa 116 peserta didik atau 64% menjawab benar, sedangkan 64 peserta didik atau 36% menjawab salah. Dengan demikian, tugas Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan dianggap kurang diketahui oleh peserta didik.

Tabel 5
Tugas Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
5.	Badan peradilan tertinggi di Indonesia adalah: a. Pengadilan Tinggi b. DPR c. Pengadilan Negeri d. BPK e. MA	155	86	25	14

Dari tabel di atas diketahui bahwa 155 peserta didik atau 86% menjawab benar, sedangkan 25 peserta didik atau 14% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang tugas lembaga Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sudah baik.

Tabel 6
Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
6.	Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh: a. DPD b. MPR c. DPR d. Rakyat e. Partai Politik	173	96	7	4

Dari tabel di atas diketahui bahwa 173 peserta didik atau 96% menjawab benar, sedangkan 7 peserta didik atau 4% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan peserta didik sangat baik mengenai tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 7
Fungsi Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
7.	Salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri didalam daerah hukumnya adalah: a. KY b. Pengadilan Tinggi c. MA d. MK e. Pengadilan Negeri	74	41	106	59

Dari tabel di atas diketahui bahwa 74 peserta didik atau 41% menjawab benar, sedangkan 106 peserta didik atau 59% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang fungsi Mahkamah Agung sangat kurang.

Tabel 8
Wewenang MPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
8.	Segala keputusan MPR ditetapkan berdasarkan: a. Absensi b. Putusan c. Perjanjian d. Kesepakatan e. Suara terbanyak	83	46	97	54

Dari tabel di atas diketahui bahwa 83 peserta didik atau 46% menjawab benar, sedangkan 97 peserta didik atau 54% menjawab salah. Dengan demikian, wewenang MPR dalam mengambil segala keputusan yang berdasarkan undang-undang sangat kurang diketahui oleh peserta didik.

Tabel 9
Wewenang Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
9.	Lembaga negara yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah: a. BPK b. Presiden c. DPR d. MA e. DPD	65	36	115	64

Dari tabel di atas diketahui bahwa 65 peserta didik atau 36% menjawab benar, sedangkan 115 peserta didik atau 64% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik mengenai wewenang Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan sangat kurang.

Tabel 10
Wewenang Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
10.	Lembaga negara yang memiliki hak untuk menerima kasasi adalah: a. MPR b. MA c. BPK d. DPD e. DPR	78	43	102	57

Dari tabel di atas diketahui bahwa 78 peserta didik atau 43% menjawab benar, sedangkan 102 peserta didik atau 57% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik sangat kurang mengetahui hak Mahkamah Agung dalam menerima kasasi.

Tabel 11
Wewenang MPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
11.	Lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan UUD adalah: a. DPD b. BPK c. MA d. MK e. MPR	145	81	35	19

Dari tabel di atas diketahui bahwa 145 peserta didik atau 81% menjawab benar, sedangkan 35 peserta didik atau 19% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik cukup mengenai wewenang MPR untuk menetapkan UUD.

Tabel 12
Susunan keanggotaan MPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
12.	Keanggotaan MPR terdiri dari anggota: a. Anggota MK dan MA b. Anggota MK dan BPK c. Anggota DPD dan MA d. Anggota DPR dan DPD e. Anggota DPR dan KY	130	72	50	28

Dari tabel di atas diketahui bahwa 130 peserta didik atau 72% menjawab benar, sedangkan 50 peserta didik atau 28% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik cukup mengetahui susunan keanggotaan MPR.

Tabel 13
Tugas MPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
13.	Lembaga negara yang menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden adalah: a. MA b. KY c. BPK d. MK e. MPR	121	67	59	33

Dari tabel di atas diketahui bahwa 121 peserta didik atau 67% menjawab benar, sedangkan 59 peserta didik atau 33% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang tugas MPR masih kurang.

Tabel 14
Tugas Dewan Pertimbangan

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
14.	Tugas dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden adalah: a. Mengangkat dan menerima duta b. Memberi gelar dan tanda jasa c. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden d. Memberikan usulan terhadap sistem pemerintahan e. Memberikan penjelasan terhadap putusan DPR	159	88	21	12

Dari tabel di atas diketahui bahwa 159 peserta didik atau 88% menjawab benar, sedangkan 21 peserta didik atau 12% menjawab salah. Dengan demikian, peserta didik mengetahui baik mengenai tugas dewan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden.

Tabel 15
Tugas Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
15.	Dalam Sistem Presidensial maka Presiden dibantu oleh: a. DPD b. DPR c. MA d. Menteri Negara e. KY	150	83	30	17

Dari tabel di atas diketahui bahwa 150 peserta didik atau 83% menjawab benar, sedangkan 30 peserta didik atau 17% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan peserta didik mengetahui baik tentang tugas Presiden dalam sistem presidensial.

Tabel 16
Wewenang Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
16.	Pemberian Amnesti dan Abolisi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan: a. MA b. DPD c. KY d. DPR e. MK	67	37	113	63

Dari tabel di atas diketahui bahwa 67 peserta didik atau 37% menjawab benar, sedangkan 113 peserta didik atau 63% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi sangat kurang.

Tabel 17
Wewenang Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
17.	Jika Presiden berhenti dalam masa jabatannya, maka yang menggantikan kewajiban dalam menjalankan sistem pemerintahan sampai akhir masa jabatannya habis adalah: a. DPR b. Menteri Negara c. DPD d. MK e. Wakil Presiden	161	89	19	11

Dari tabel di atas diketahui bahwa 161 peserta didik atau 89% menjawab benar, sedangkan 19 peserta didik atau 11% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik mengetahui baik tentang prosedur pemberhentian jabatan Presiden.

Tabel 18
Wewenang DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
18.	Lembaga negara yang berwenang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah: a. MK b. DPR c. MA d. MPR e. KY	110	61	70	39

Dari tabel di atas diketahui bahwa 110 peserta didik atau 61% menjawab benar, sedangkan 70 peserta didik atau 39% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang DPR masih kurang.

Tabel 19
Wewenang BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
19.	Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah: a. MPR b. BPK c. MK d. MA e. DPR	173	96	7	4

Dari tabel di atas diketahui bahwa 173 peserta didik atau 96% menjawab benar, sedangkan 7 peserta didik atau 4% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang BPK sangat baik.

Tabel 20
Wewenang Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
20.	Pemberian Grasi dan Rehabilitasi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan: a. MA b. KY c. DPR d. DPD e. MK	95	53	85	47

Dari tabel di atas diketahui bahwa 95 peserta didik atau 53% menjawab benar, sedangkan 85 peserta didik atau 47% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik sangat kurang mengetahui tentang wewenang Presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi.

Tabel 21
Cara Pemilihan Anggota DPD

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
21.	Menurut pasal 22 C ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui: a. Absensi b. Pemilu c. Suara terbanyak d. Perjanjian e. Kesepakatan	108	60	72	40

Dari tabel di atas diketahui bahwa 108 peserta didik atau 60% menjawab benar, sedangkan 72 peserta didik atau 40% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang cara pemilihan anggota DPD sangat kurang.

Tabel 22
Wewenang Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
22.	Dalam pasal 13 ayat 1, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat: a. Dirjen b. Duta dan Konsul c. Dewan Pertimbangan d. Staf Ahli e. Atase	95	53	85	47

Dari tabel di atas diketahui bahwa 95 peserta didik atau 53% menjawab benar, sedangkan 85 peserta didik atau 47% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Presiden mengangkat duta dan konsul masih sangat kurang.

Tabel 23
Wewenang Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
23.	Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan adalah: a. BPK b. Presiden c. DPR d. MA e. DPD	165	92	15	8

Dari tabel di atas diketahui bahwa 165 peserta didik atau 92% menjawab benar, sedangkan 15 peserta didik atau 8% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Mahkamah Agung sangat baik.

Tabel 24
Wewenang Mahkamah Konstitusi

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
24.	Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD adalah: a. DPR b. DPD c. BPK d. MPR e. MK	129	72	51	28

Dari tabel di atas diketahui bahwa 129 peserta didik atau 72% menjawab benar, sedangkan 51 peserta didik atau 28% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik cukup memahami tentang wewenang Mahkamah Konstitusi.

Tabel 25
Lembaga Mahkamah Konstitusi

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
25.	Lembaga negara yang baru terbentuk setelah adanya perubahan UUD 1945 yang memiliki kekuasaan di bidang kehakiman adalah: a. Presiden b. DPD c. MK d. DPR e. BPK	152	84	28	16

Dari tabel di atas diketahui bahwa 152 peserta didik atau 84% menjawab benar, sedangkan 28 peserta didik atau 16% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan peserta didik mengetahui baik tentang lembaga Mahkamah Konstitusi.

Tabel 26
Wewenang Komisi Yudisial

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
26.	Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR adalah: a. BPK b. KY c. DPR d. DPD e. Presiden	127	71	53	29

Dari tabel di atas diketahui bahwa 127 peserta didik atau 71% menjawab benar, sedangkan 53 peserta didik atau 29% menjawab salah. Dengan demikian, peserta didik cukup mengetahui mengenai wewenang Komisi Yudisial dalam hal pengusulan hakim agung.

Tabel 27
Keanggotaan Mahkamah Agung

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
27.	Lembaga negara yang keanggotaannya terdiri dari hakim agung adalah: a. BPK b. DPR c. DPD d. Presiden e. MA	174	97	6	3

Dari tabel di atas diketahui bahwa 174 peserta didik atau 97% menjawab benar, sedangkan 6 peserta didik atau 3% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang keanggotaan MPR sangat baik.

Tabel 28
Hak Interpelasi DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
28.	Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintahan disebut: a. Angket b. Budget c. Interpelasi d. Imunitas e. Protokoler	88	49	92	51

Dari tabel di atas diketahui bahwa 88 peserta didik atau 49% menjawab benar, sedangkan 92 peserta didik atau 51% menjawab salah. Dengan demikian, peserta didik sangat kurang mengetahui tentang hak interpelasi yang dimiliki oleh para anggota DPR.

Tabel 29
Keanggotaan DPD

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
29.	Menurut pasal 22 C ayat 2, anggota Dewan Pemerintahan Daerah dipilih dari setiap: a. Provinsi b. Kabupaten c. Kotamadya d. Kecamatan e. Kelurahan	104	58	76	42

Dari tabel di atas diketahui bahwa 104 peserta didik atau 58% menjawab benar, sedangkan 76 peserta didik atau 42% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang keanggotaan DPD sangat kurang.

Tabel 30
Wewenang DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
30.	Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk UU adalah: a. KY b. MA c. BPK d. MK e. DPR	119	66	61	34

Dari tabel di atas diketahui bahwa 119 peserta didik atau 66% menjawab benar, sedangkan 61 peserta didik atau 34% menjawab salah. Dengan demikian, peserta didik masih kurang mengetahui tentang wewenang DPR dalam membentuk undang-undang.

Tabel 31
Lembaga Komisi Yudisial

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
31.	Lembaga negara yang di bentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 yang memiliki sifat mandiri adalah: a. MA b. BPK c. MPR d. DPD e. KY	80	44	100	56

Dari tabel di atas diketahui bahwa 80 pesertadidik atau 44% menjawab benar, sedangkan 100 pesertadidik atau 56% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan pesertadidik tentang lembaga Komisi Yudisial sangat kurang.

Tabel 32
Cara Pemilihan Anggota DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
32.	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui: a. Pemilu b. Putusan c. Suara terbanyak d. Perjanjian e. Kesepakatan	108	60	72	40

Dari tabel di atas diketahui bahwa 108 pesertadidik atau 60% menjawab benar, sedangkan 72 pesertadidik atau 40% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan pesertadidik tentang cara pemilihan anggota DPR sangat kurang.

Tabel 33
Fungsi DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
33.	Lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah: a. KY b. DPR c. DPD d. MPR e. MK	92	51	88	49

Dari tabel di atas diketahui bahwa 92 peserta didik atau 51% menjawab benar, sedangkan 88 peserta didik atau 49% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang fungsi DPR sangat kurang.

Tabel 34
Pemegang Kekuasaan Legislatif

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
34.	Pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia adalah: a. MK b. Presiden c. DPR d. DPD e. MA	110	61	70	39

Dari tabel di atas diketahui bahwa 110 peserta didik atau 61% menjawab benar, sedangkan 70 peserta didik atau 39% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif masih kurang.

Tabel 35
Wewenang Mahkamah Konstitusi

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
35.	Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah: a. DPR b. BPK c. DPD d. MK e. Presiden	71	39	109	61

Dari tabel di atas diketahui bahwa 71 peserta didik atau 39% menjawab benar, sedangkan 109 peserta didik atau 61% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Mahkamah Konstitusi sangat kurang.

Tabel 36
Wewenang BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
36.	Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPRD, dan DPD adalah: a. DPD b. Presiden c. MK d. DPR e. BPK	169	94	11	6

Dari tabel di atas diketahui bahwa 169 peserta didik atau 94% menjawab benar, sedangkan 11 peserta didik atau 6% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik mengenai wewenang BPK sangat baik.

Tabel 37
Wewenang Mahkamah Konstitusi

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
37.	Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai politik di Indonesia adalah: a. Presiden b. MK c. BPK d. DPD e. DPR	81	45	99	55

Dari tabel di atas diketahui bahwa 81 peserta didik atau 45% menjawab benar, sedangkan 99 peserta didik atau 55% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik sangat kurang diketahui oleh peserta didik.

Tabel 38
Hak Angket DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
38.	Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden disebut: a. Interplasi b. Budget c. Angket d. Petisi e. Inisiatif	73	41	107	59

Dari tabel di atas diketahui bahwa 73 peserta didik atau 41% menjawab benar, sedangkan 107 peserta didik atau 59% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang hak angket DPR sangat kurang.

Tabel 39
Wewenang DPD

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
39.	Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah adalah: a. MA b. BPK c. MPR d. DPD e. KY	133	74	47	26

Dari tabel di atas diketahui bahwa 133 peserta didik atau 74% menjawab benar, sedangkan 47 peserta didik atau 26% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wewenang DPD untuk melakukan pengawasan terhadap masalah yang terjadi di daerah cukup diketahui oleh peserta didik.

Tabel 40
Wewenang Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
40.	Pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah: a. Ketua KY b. Presiden c. Ketua DPR d. Ketua MK e. Ketua MA	155	86	25	14

Dari tabel di atas diketahui bahwa 155 peserta didik atau 86% menjawab benar, sedangkan 25 peserta didik atau 14% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang wewenang Presiden dalam angkatan bersenjata.

Tabel 41
Hak Budget DPR

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
41.	DPR memiliki hak budget yaitu: a. Hak untuk mengusulkan RUU b. Hak untuk meminta keterangan c. Hak untuk mengadakan suatu penyelidikan d. Hak untuk mengajukan RAPBN e. Hak menyampaikan pendapat	102	57	78	43

Dari tabel di atas diketahui bahwa 102 peserta didik atau 57% menjawab benar, sedangkan 78 peserta didik atau 43% menjawab salah. Dengan demikian, peserta didik sangat kurang mengetahui tentang hak yang dimiliki oleh DPR.

Tabel 42
Hak Prerogatif Presiden

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
42.	Hak Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, baik yang memimpin departemen maupun nondepartemen, disebut: a. Hak Imunitas b. Hak Interplasi c. Hak Prerogatif d. Hak Angket e. Hak Budget	80	44	100	56

Dari tabel di atas diketahui bahwa 80 peserta didik atau 44% menjawab benar, sedangkan 100 peserta didik atau 56% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik mengenai hak prerogatif Presiden sangat kurang.

Tabel 43
Kedudukan BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
43.	Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di: a. Ibu kota negara b. Provinsi c. Kotamadya d. Kabupaten e. Kecamatan	153	85	27	15

Dari tabel di atas diketahui bahwa 153 peserta didik atau 85% menjawab benar, sedangkan 27 peserta didik atau 15% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik mengenai kedudukan BPK sangat baik.

Tabel 44
Wewenang Mahkamah Konstitusi

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
44.	Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/Wapres menurut UUD adalah: a. MA b. MK c. DPD d. BPK e. KY	76	42	104	58

Dari tabel di atas diketahui bahwa 76 peserta didik atau 42% menjawab benar, sedangkan 104 peserta didik atau 58% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik sangat kurang tentang wewenang Mahkamah Konstitusi.

Tabel 45
Keanggotaan BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
45.	Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan: a. DPR dengan pertimbangan DPD b. Presiden dengan pertimbangan MA c. MA dengan pertimbangan KY d. MPR dengan pertimbangan DPR e. DPD dengan pertimbangan MK	76	42	104	58

Dari tabel di atas diketahui bahwa 76 peserta didik atau 42% menjawab benar, sedangkan 104 peserta didik atau 58% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik mengenai keanggotaan BPK sangat kurang.

Tabel 46
Wewenang BPK

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
46.	Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan: a. Presiden dengan persetujuan DPR b. Presiden dengan persetujuan MK c. Presiden dengan persetujuan DPD d. Presiden dengan persetujuan KY e. Presiden dengan persetujuan BPK	91	51	89	49

Dari tabel di atas diketahui bahwa 91 peserta didik atau 51% menjawab benar, sedangkan 89 peserta didik atau 49% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang teknis pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial sangat kurang.

Tabel 47
Wewenang DPD

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
47.	Bila suatu provinsi ingin melakukan otonomi daerah dan mengadakan pemekaran terhadap daerahnya, maka kewenangannya berada di bawah lembaga: a. MA b. Presiden c. MPR d. BPK e. DPD	155	86	25	14

Dari tabel di atas diketahui bahwa 155 peserta didik atau 86% menjawab benar, sedangkan 25 peserta didik atau 14% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik mengetahui dengan baik mengenai kewenangan DPD.

Tabel 48
Sifat yang dimiliki Komisi Yudisial

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
48.	Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat 1 bersifat: a. Bijaksana b. Mandiri c. Adil d. Tetap e. Konsisten	84	47	96	53

Dari tabel di atas diketahui bahwa 84 peserta didik atau 47% menjawab benar, sedangkan 96 peserta didik atau 53% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang sifat mandiri yang dimiliki oleh lembaga Komisi Yudisial sangat kurang.

Tabel 49
Wewenang DPD

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
49.	Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan masalah pajak, pendidikan, dan agama di setiap daerah adalah: a. DPR b. BPK c. DPD d. MK e. Presiden	110	61	70	39

Dari tabel di atas diketahui bahwa 110 peserta didik atau 61% menjawab benar, sedangkan 70 peserta didik atau 39% menjawab salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peserta didik masih kurang mengetahui wewenang DPD dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 50
Aturan tentang susunan dan kedudukan Komisi Yudisial

No.	Pertanyaan	Frekuensi Jawaban			
		Benar	%	Salah	%
50.	Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan: a. UU b. PP c. Perpres d. Keppres e. Perda	105	58	75	42

Dari tabel di atas diketahui bahwa 105 peserta didik atau 58% menjawab benar, sedangkan 75 peserta didik atau 42% menjawab salah. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang aturan susunan dan kedudukan Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang sangat kurang.

Jika dilihat dari hasil kemampuan pesertadidik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan untuk melihat kemampuan pesertadidik tentang pemahaman Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah pesertadidik dapati di sekolah. Terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu:

1. Pemahaman pesertadidik tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah cukup dipahami oleh pesertadidik, artinya pesertadidik cukup mengetahui substansi dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen, khususnya pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur akan tugas, fungsi dan wewenang dari lembaga negara tersebut.
2. Pemahaman pesertadidik tentang lembaga kepresidenan sudah cukup dipahami oleh pesertadidik, karena pesertadidik memahami praktek yang terjadi antara kewenangan Presiden dalam membuat suatu kebijakan dengan DPR sebagai lembaga legislatif.
3. Pemahaman pesertadidik tentang Dewan Perwakilan Rakyat masih sangat kurang dipahami, karena ketidaktahuan akan lembaga tersebut. Pesertadidik mengetahui tugas DPR hanya membuat rancangan undang-undang.
4. Pemahaman pesertadidik akan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah cukup dipahami, karena pesertadidik memahami kinerja dari lembaga tersebut yaitu khususnya mengenai masalah otonomi daerah. Lembaga ini merupakan lembaga yang baru dibentuk pada saat amandemen tahap ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Pemahaman pesertadidik tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan cukup dipahami dan dimengerti oleh pesertadidik, karena

lembaga inilah yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang penggunaan keuangan negara.

6. Pemahaman peserta didik tentang Mahkamah Agung juga masih kurang dipahami, kondisi ini dikorelasikan dengan keadaan nyata, karena adanya kekecewaan akan kinerja dari anggota lembaga tersebut, hal ini terjadi karena di dalam lembaga tersebut tidak adanya supremasi hukum, peserta didik melihat tidak adanya transparansi dalam menangani suatu perkara. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena lembaga yudikatif yang ada di Indonesia tidak memberikan cerminan yang baik kepada generasi muda bangsa.
7. Pemahaman peserta didik akan kewenangan Komisi Yudisial masih sangat kurang, karena lembaga ini baru saja terbentuk setelah amandemen tahap ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peserta didik hanya mengetahui sebatas apa yang dijelaskan oleh guru dan sebatas dengan materi yang dijabarkan di buku pelajaran, sehingga peserta didik tidak mengkaji dan belum mengetahui lebih jelas akan wewenang, tugas, dan fungsi dari lembaga tersebut.
8. Pemahaman peserta didik tentang Mahkamah Konstitusi juga masih sangat kurang, kondisi ini berkorelasi dengan ketidaktahuan akan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman tersebut, karena lembaga ini baru saja terbentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, materi yang terdapat di dalam buku pelajaran tidak semuanya menjelaskan secara keseluruhan tentang kewenangan dari lembaga tersebut seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga penjelasannya masih kurang dapat dipahami.

Berdasarkan pada hasil data-data yang diperoleh di atas maka, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah cukup dipahami, terutama mengenai pemahaman peserta didik tentang struktur kelembagaan negara, karena dari kedelapan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya hanya empat lembaga negara saja yang cukup dipahami oleh peserta didik yaitu MPR, Presiden, DPD, dan BPK. Hal ini dikarenakan tugas, fungsi, dan wewenang dari keempat lembaga tersebut tidak terlalu banyak hanya terfokus pada bidangnya masing-masing. Sedangkan empat lembaga lainnya tugas, fungsi, dan wewenangnya cukup banyak yang tidak diketahui oleh peserta didik dan kurangnya pengetahuan peserta didik akan substansi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan tentang aturan yuridis dari struktur kelembagaan negara, karena dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya lembaga-lembaga negara tersebut harus berdasarkan dengan konstitusi, sehingga tidak akan terjadi lagi pemusatan kekuasaan.

Selain itu, kurangnya pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terjadi karena dari dalam diri peserta didiknya sendiri tidak ada niat untuk mengkaji lebih dalam dan tidak dapat dihayati, sehingga tidak ada rasa cinta akan konstitusi Indonesia. Hal ini sangatlah disayangkan, karena nilai-nilai dari substansi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah peserta didik pelajari sangatlah berguna untuk dikemudian hari, karena materi ini secara tidak langsung terus terkait, seperti contoh kecilnya saja dapat digunakan dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini pembelajaran Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilakukan pihak sekolah dalam memberikan pemahaman kepada pesertadidik dilakukan baik dengan pendekatan langsung ataupun tidak langsung. Pendekatan langsung yaitu dilakukan dengan cara pemberian materi secara eksplisit dalam kegiatan proses belajar mengajar. Secara lebih luas lingkungan sekolah memberikan materi pembelajaran yang memungkinkan pesertadidik untuk lebih memahami Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melalui aplikasinya langsung seperti proses pemilihan ketua kelas, ketua OSIS jika dikaitkan hubungannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia, maka kegiatan tersebut sama saja pesertadidik sedang mengaplikasikan struktur kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945/konstitusi, namun dalam skala kecil yaitu di tingkat sekolah yang mana konstitusinya itu adalah aturan yang dibuat oleh suatu kesepakatan dalam organisasi tersebut. Kegiatan seperti itu, akan menjadikan pengetahuan dan pemahaman dasar bagi dirinya dalam melanjutkan proses pembelajaran yang sebenarnya, jika suatu saat pesertadidik ikut terjun langsung dalam kegiatan sistem pemerintahan yang nyata.

Dalam pendekatan yang tidak langsung proses pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini keluarga dan masyarakat secara luas memiliki peranan. Pada pendekatan ini umumnya pesertadidik dikenalkan secara tidak langsung bagaimana

memahami Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya mengenai kinerja dari lembaga negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewengangnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proses ini dapat dilakukan oleh peserta didik dengan cara melihat langsung proses yang terjadi di dalam kelembagaan negara, artinya peserta didik dapat melihat secara langsung kinerja dari masing-masing anggota dari struktur kelembagaan negara melalui media massa baik itu televisi, radio, maupun koran. Peserta didik dapat membaca dan menghubungkan teori yang telah peserta didik dapatkan dalam pembelajaran yang dijelaskan oleh guru di sekolah.

Berdasarkan pada hasil data-data yang diperoleh secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama mengenai pemahaman peserta didik tentang struktur kelembagaan negara, karena dari kedelapan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewengangnya hanya empat lembaga negara saja yang cukup dipahami oleh peserta didik yaitu MPR, Presiden, DPD, dan BPK. Hal ini dikarenakan tugas, fungsi, dan wewenang dari kedua lembaga tersebut tidak terlalu banyak hanya terfokus pada bidangnya masing-masing.

Selebihnya peserta didik hanya mengetahui sebatas apa yang telah dipelajari dan sebatas dengan apa yang peserta didik ketahui dari informasi yang peserta didik dapatkan dari media pembelajaran yang lain yaitu melalui pemberitaan dari televisi, radio, dan koran. Itupun tidak semua peserta didik melakukan kajian yang lebih dalam tentang hal tersebut. Hanya peserta didik yang menyenangi pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan saja yang erat hubungannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia, sehingga sedikit sekali peserta didik yang membaca dan mengamati proses Sistem Pemerintahan Indonesia yang terjadi saat ini.

Dari hasil wawancara peneliti dengan *informan* dan *expert opinion*, serta 15 orang responden peserta didik kelas XI yang diwawancari secara acak, maka diperoleh beberapa kesimpulan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini, mengenai pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah peserta didik pelajari dalam muatan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam memahami Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini terjadi karena jam pelajaran dalam seminggu serta metode yang digunakan yaitu *pertama*, dua jam pelajaran dalam seminggu tidaklah cukup untuk menjelaskan secara rinci mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari kedelapan lembaga negara sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kondisi ini pun di luar hari libur nasional yang mungkin saja bertepatan dengan jam pelajaran. Dengan demikian, untuk memenuhi target materi sampai dengan akhir semester dirasa kurang optimal. Hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *informan*, “Kendalanya hanya waktu, karena di sekolah mereka hanya mendapatkan materi hanya 2 jam dalam seminggu, dan tidak semua peserta didik mengikuti kondisi perkembangan saat ini.”¹ Kondisi ini ditambah dengan kurangnya sarana seperti buku-buku penunjang dan kurangnya minat baca peserta didik. Hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *expert opinion*, “Ada

¹ Wawancara dengan Ibu Nanti Triwardhani Utami. Tanggal 24 Maret 2008.

kemungkinan buku-buku yang disiapkan kurang diporsir oleh guru untuk dipelajari sebelum memasuki kelas, jadi peserta didik itu kalau sudah masuk kelas, ada guru baru mulai dia ikut memikirkan apa yang akan diajarkan, jadi belajarnya seadanya tidak penuh perhatian sebelumnya, hal-hal seperti itulah yang membuat para peserta didik/pelajar kurang memperhatikan secara sungguh-sungguh.”²

Kondisi *kedua*, terjadi karena kurangnya perhatian dari peserta didik untuk mempelajari materi tersebut. Hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *expert opinion*, “Pada umumnya karena PKn itu tidak termasuk di dalam ujian nasional, sehingga perhatian peserta didik terhadap PKn itu terlalu tinggi, seperti terhadap pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.³ PKn itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenai langsung dalam kehidupan mereka, karena dalam pikiran mereka antara luar sekolah dengan apa yang diajarkan di sekolah itu sangat jauh atau sangat lebar perbedaannya. Inginnya kita jika diajarkan di sekolah dalam implikasinya harus sama dalam kehidupan di masyarakat. Perhatian yang kurang itu sebenarnya dapat dikembangkan oleh guru di kelas. Di dalam kelas guru harus mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh.”

Kondisi *ketiga*, dikarenakan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas kurang bervariasi. Hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *expert opinion*, “Sekarang ini guru di kelas itu kebanyakan juga mengajarkannya tidak dengan metodologi yang bervariasi, kebanyakan dengan ceramah paling-paling dengan tanya

² Wawancara dengan Bapak Ismail Arianto. Tanggal 14 Mei 2008.

³ Wawancara dengan Bapak Ismail Arianto. Tanggal 14 Mei 2008.

jawab.⁴ Jarang sekali, walaupun ada itu dengan menggunakan diskusi-diskusi kelompok yang dapat menggerakkan minat peserta didik untuk mempelajari topik-topik atau bahasan-bahasan mengenai PKn itu. Jangan biarkan peserta didik itu belajar seadanya, harus ditingkatkan motivasinya. Ini sebenarnya yang paling penting saya lihat untuk masa depan pelajaran PKn.”

Kondisi *keempat*, terjadi karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen kurang disosialisasikan di kelas, karena adanya beberapa keterbatasan, hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *expert opinion*, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajarkan di sekolah masih kurang disosialisasikan, hal ini dikarenakan mereka tidak tiap hari mempelajari suatu topik yang berkenaan dengan substansi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap hari topik bahasannya berubah-ubah, sehingga terlalu sedikit rasanya untuk membicarakan hal-hal yang seharusnya lebih banyak diberikan kepada hal-hal yang penting seperti materi mengenai hubungan antar lembaga negara dan fungsi antar masing-masing lembaga negara.”⁵

Kondisi *kelima*, terjadi karena kurangnya pengetahuan peserta didik akan tugas, fungsi, dan wewenang dari delapan lembaga negara yang ada di Indonesia, hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan 15 orang responden peserta didik kelas XI yang diwawancarai secara acak, mereka menyatakan bahwa “Cukup tahu, tidak seluruhnya hanya sebagian,⁶ misalnya saja a). Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki wewenang untuk melantik dan memberhentikan

⁴ Wawancara dengan Bapak Ismail Arianto. Tanggal 14 Mei 2008.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ismail Arianto. Tanggal 14 Mei 2008.

⁶ Wawancara dengan 15 responden peserta didik kelas XI. Tanggal 12-13 Maret 2008.

Presiden dan Wapres, menetapkan, dan mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2). Presiden yaitu sebagai kepala negara/kepala pemerintahan yang menjalankan Sistem Pemerintahan Indonesia dan dibantu oleh para menteri negara, 3). Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang untuk mengurus masalah otonomi daerah dan masalah daerah yang ingin melakukan perluasan daerah/pemekaran daerah, 4). Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat rancangan undang-undang bersama Presiden sebagai *eksekutif*, 5). Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk mengurus keuangan negara, 6). Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, 7). Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga negara yang memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, contohnya beberapa kasus pilkada di daerah, seperti kasus hasil pilkada Depok, dan untuk lembaga Komisi Yudisial, pesertadidik tidak tahu akan tugas dan fungsinya.

Dalam mengupayakan peningkatan pemahaman pesertadidik akan kewenangan dari struktur kelembagaan negara diadakan sosialisasai mengenai materi tersebut, tetapi tidak mengkaji secara mendalam. Hal ini seperti ditegaskan oleh seorang *informan*,” Memberikan penjelasan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷ Contohnya saja, mengenai materi hubungan dan perjanjian internasional yang saat ini mereka pelajari, di dalam materi itu menjelaskan mengenai tugas pemerintah Indonesia, khususnya Presiden dalam melakukan hubungan dan perjanjian dengan negara lain, dalam melakukan suatu

⁷ Wawancara dengan Ibu Nanti Triwardhani Utami. Tanggal 24 Maret 2008.

hubungan internasional, maka Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat duta dan konsul, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, semua penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Dengan adanya pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain dapat menjalin kerjasama yang baik antar negara dan adanya perlindungan bagi warganegara Indonesia yang sedang berada baik di luar negeri maupun warganegara asing yang sedang berada di Indonesia. Dalam melakukan perjanjian internasional, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat 1.”

Hal ini juga ditegaskan oleh seorang *expert opinion*, yang menyatakan bahwa sosialisasi diperlukan agar peserta didik dapat mengerti apa yang dipelajari olehnya di kelas, “Jadi sosialisasi itu ada dua macam, *pertama* sosialisasi lewat pendidikan yaitu yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, *kedua*, sosialisasi melalui media massa yaitu melalui televisi, radio, dan koran artinya semua itu dijelaskan secara luas kepada masyarakat dan tentu termasuk didalamnya para peserta didik yang suka membaca koran dan melihat televisi dan yang senang mendengarkan berita di radio.”⁸

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, guru di sekolah memberikan tugas kepada peserta didiknya, hal ini bertujuan untuk melatih kepekaan peserta didik terhadap keadaan Sistem Pemerintahan Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh seorang *informan*, “Dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak Ismail Arianto. Tanggal 14 Mei 2008.

memberikan tugas berupa makalah atau artikel yang membahas mengenai suatu kasus yang sedang terjadi pada saat ini, dengan adanya tugas tersebut dapat mengembangkan daya pikir pesertadidik untuk menjadi lebih kritis dalam menanggapi persoalan yang terjadi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini, khususnya mengenai sistem kelembagaan negara yang telah mengalami empat tahap perubahan.”⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan *informan, expert opinion*, dan 15 orang responden pesertadidik kelas XI yang diwawancari secara acak serta tambahan data dan informasi dokumen yang ada pada SMA Negeri 93 Jakarta. Proses pemahaman Sistem Pemerintahan Indonesia yang selama ini berlangsung dilaksanakan dengan metode klasik, yakni proses belajar mengajar yang cenderung satu arah dengan pusat perhatian kepada guru. Meskipun demikian, seperti yang disebutkan sebelumnya bila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh pesertadidik, proses tanya jawab tetap terjadi. Dengan demikian, metode yang dipakai tidak mutlak tanpa variasi lain, meskipun di sini dominasi guru masih sangat dominan sekali. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam hal mensosialisasikan dan melatih kepekaan pesertadidik untuk terus meningkatkan pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia harus terus dilakukan bukan saja sebatas pada sub bahasan yang diberikan di kelas, namun harus ada juga suatu motivasi kepada pesertadidik untuk lebih mengetahui akan perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nanti Triwardhani Utami. Tanggal 24 Maret 2008.

D. Keterbatasan Studi

Di sadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna, setelah peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 93 Jakarta. Namun, karena keterbatasan dari kemampuan peneliti, maka peneliti tidak membahas secara keseluruhan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, perlu ada studi lebih lanjut untuk membahas lebih komprehensif mengenai pemahaman pesertadidik tentang Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, dari *informan* dan *expert opinion* adalah orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya. Meskipun bersedia diwawancarai, tetapi tidak bisa dilaksanakan secara mendalam. *Kedua*, terbatasnya waktu penelitian di sekolah, karena pada saat dilakukan penelitian banyak waktu yang terpotong, hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan ujian blok dan kegiatan persiapan (*Try Out*) dalam menghadapi Ujian Nasional untuk kelas XII pada bulan April 2008 yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. *Ketiga*, keterbatasan waktu dan biaya yang peneliti miliki secara tidak langsung mempengaruhi *output* penelitian ini. Oleh karena itu, kiranya dalam penelitian tentang pemahaman pesertadidik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa menginspirasi pada penelitian yang akan datang dan masih terbuka untuk penelitian selanjutnya.